

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Ekatjahjana, Widodo, 2015, *Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, UPT Penerbitan Universitas Jember, Jember.
- Fuady, Munir, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hardiman, Fransisco Budi, 2009, *Demokrasi Deliberatif Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Isharyanto, 2016, *Ilmu Negara*, Oase Pustaka, Karanganyar.
- Isra, Saldi, 2018, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Rajawali Pers, Depok.
- Mahfud, Moh, 2018, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Marius Bo, Eduardus, 2019, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, Setara Press, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Nasution, Zulkarimein, 1990, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2017, *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sidharta, B Arief, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Editor : Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sirajuddin dan Winardi, 2016, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.

- Sirajuddin, Fatkhurohman dan Zulkarnain, 2016, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang.
- Soehino, 2010, *Hukum Tata Negara Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, 2015, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 2016, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Thaib, Dahlan, 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Editor : Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Wiratraman, Herlambang Perdana, 2020, *Negara Hukum Indonesia di Era Post-Truth*, dalam Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth, Editor : Tristam Pascal Moeliono dan Widodo Dwi Putro, Sanabil, Mataram.
- Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zein, Yahya Ahmad, Ristina Yudhanti dan Aditia Syaprillah, 2016, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-Undangan*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.

**Karya Ilmiah:**

- Armawan, 2016, “Rumusan Demokrasi dan Negara Hukum dalam Norma Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasca Perubahan”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Habibie, Muhammad Mirza, 2021, “Politik Hukum Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Prospek Terhadap Hubungan Antara Pusat dan Daerah”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Ibrahim, Anis, 2008, “Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi : Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Roihan, Muhammad Irham, 2021, “Omnibus Law ditinjau dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

**Makalah :**

- Wiratraman, R. Herlambang Perdana, *Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi dalam Wacana Demokratisasi dan Kritik Rule of Law*, Makalah, tidak dipublikasikan.

### **Jurnal :**

- Azzahra Putri, Zhaudiva dan Rahayu Subekti, “Teori Legislasi dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Arnstein, Sherry R, “A Ladder of Citizen Participation”, *Journal of The American Institute of Planners*, Vol. 35, No. 4, November, 2007.
- Haliim, Wimmy, “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum Yang Responsif”, *Masyarakat Indonesia*, Vol 42 (1), 2016.
- Jati, Wasisto Raharjo, “Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021”, *THC Insights*, No. 27, Juni, 2021.
- Kamarudin, “Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”, *Perspektif Hukum*, Vol. 15, No. 2, November, 2015.
- Rishan, Idul, “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, Maret, 2021.
- Scheppele, Kim Lane, “Autocratic Legalism”, *The University of Chicago Law Review*, Vol. 85, No. 2, March, 2018.
- Wintgens, Luc J., “Legisprudence as a New Theory of Legislation”, *Ratio Juris*, Vol. 19, No. 1, March, 2006.

### **Peraturan Perundan-undangan dan Risalah:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan Naskah Akademik.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-sendi / Fundamental Negara, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250).

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022

**Internet:**

CARE International, <https://www.careemergencytoolkit.org/topics-issues/4-participation/1-introduction/1-3-how-emergencies-affect-participation/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2023.

CR-28, 2022, “Pembentukan UU Ibu Kota Negara Dinilai Belum Penuhi Partisipasi Bermakna”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembentukan-uu-ibu-kota-negara-dinilai-belum-penuhi-partisipasi-bermakna-lt61fbce623ea29/?page=1>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.

Dzulfaroh, Ahmad Naufal, 2020, “Pemerintah dan DPR ngotot mengesahkan omnibus law UU Cipta Kerja”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/190300665/kenapa-pemerintah-dan-dpr-ngotot-mengesahkan-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada tanggal 22 November 2021.

Damarjati, Danu 2020, “Gonta-ganti Begini Perubahan Draf UU Cipta Kerja sampai 1035 Halaman” <https://news.detik.com/berita/d-5210415/gonta-ganti-begini-perubahan-draf-uu-cipta-kerja-sampai-1035-halaman/1>, diakses pada tanggal 22 November 2021.

Harijanti, Susi Dwi, 2014, Bila Hukum Positif Bertentangan dengan Asas Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum-lt52d0d2e4afc2c>, diakses pada tanggal 07 September 2022.

Kanal Pengetahuan FH UGM, 2022, “Problematika Penyusunan Undang-Undang: Belajar dari UU Cipta Kerja - Kuliah Umum PPPU”, <https://www.youtube.com/watch?v=ieqpf8tA1WI>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022.

Liputan 6.com, 2020, “Aksi Massa Demo UU Cipta Kerja Rusak dan Bakar Fasilitas Publik di Surabaya”, <https://surabaya.liputan6.com/read/4377568/aksi-massa-demo-uu-cipta-kerja-rusak-dan-bakar-fasilitas-publik-di-surabaya>, diakses pada tanggal 22 November 2021.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormPUUDetail&pages=3&id=2>, diakses pada tanggal 22 November 2021.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=5&cari=Cipta+Kerja>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022
- Ernes, Yogi, 2020, "Massa Demo Omnibus Law Rusak-Bakar Fasilitas, Kapolda Metro: Kita Kejar!", <https://news.detik.com/berita/d-5210046/massa-demo-omnibus-law-rusak-bakar-fasilitas-kapolda-metro-kita-kejar>, diakses pada tanggal 22 November 2021.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2020, "Legislasi nan Menyebalkan", [https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/20/legislasi-nan-menyebalkan/?status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/20/legislasi-nan-menyebalkan/?status_login=login), diakses pada tanggal 22 November 2021.
- \_\_\_\_\_, 2022, "Pekerjaan Rumah Pasca-Putusan MK", [https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/14/pekerjaan-rumah-pasca-putusan-mk?status\\_login=sukses\\_login&status=sukses\\_login&utm\\_source=kompasid&utm\\_medium=login\\_paywall&utm\\_campaign=login&utm\\_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fartikel-opini%2F2022%2F02%2F14%2Fpekerjaan-rumah-pasca-putusan-mk&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/14/pekerjaan-rumah-pasca-putusan-mk?status_login=sukses_login&status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fartikel-opini%2F2022%2F02%2F14%2Fpekerjaan-rumah-pasca-putusan-mk&status_login=login), diakses pada tanggal 15 Februari 2022.
- PUSHEP, 2021, "PUSHEP Diskusikan Putusan MK terkait Uji Formil dan Materiil Revisi UU Minerba", <https://pushep.or.id/pushep-diskusikan-putusan-mk-terkait-uji-formil-dan-materiil-revisi-uu-minerba/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.
- Sahbani, Agus, 2021, "MK Putuskan 11 Pengujian UU Cipta Kerja Lain Kehilangan Objek", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-11-pengujian-uu-cipta-kerja-lain-kehilangan-objek-lt61a12cc294ca7?page=2>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022.
- Susanto, Vendy Yhulia, 2022, "Pemerintah Harus Patuh Putusan MK untuk Tangguhkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja", <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-harus-patuh-putusan-mk-untuk-tangguhkan-aturan-turunan-uu-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022.
- <https://rispub.law.ugm.ac.id/2020/11/06/kertas-kebijakan-catatan-kritis-terhadap-uu-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/> dan <https://pshk.or.id/riset/>.
- <https://www.citizenshandbook.org/arnsteinsladder.html>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022.
- <https://www.uui.ac.id/tanggapan-uui-atas-putusan-pengujian-uu-kpk/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/IndexBy?kode=jenis>, diakses ada tanggal 23 Desember 2022.
- Kamus:**  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Partisipasi> diakses pada tanggal 24 Januari 2022.